



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BUNIBAKTI**

**KECAMATAN BABELAN**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 9 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

**DEDY SUPRIYADI**



# *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUNIBAKTI  
KECAMATAN BABELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunibakti Kecamatan Babelan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-12.21/PBW-BIG/IGD.04.05/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan T.A 2021;
  2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.
  3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3545-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3547-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas

Desa/Kelurahan Nomor 146/3529-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;

6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3530-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3668-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3531-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUNIBAKTI KECAMATAN BABELAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadukan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
  13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
  14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
  15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungan dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk

- peta.
16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
  17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
  18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
  19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
  20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
  21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
  22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bunibakti Kecamatan Babelan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Huripjaya Kecamatan Babelan;  
Sebelah Selatan : Desa Kedungjaya dan Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan;  
Sebelah Timur : Desa Muarabakti Kecamatan Babelan;  
Sebelah Barat : Desa Samudra Jaya dan Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya.

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Desa Bunibakti Kecamatan Babelan adalah sebagai berikut :

**a. Batas Desa Bunibakti Kecamatan Babelan dengan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pahlawan Setia, Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya, dan Desa Bunibakti Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2006-02.2001-000 dengan koordinat 107° 1' 16,770" BT dan 6° 7' 30,852" LS.
2. Selanjutnya selatan saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Desa Bunibakti, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2004-02.2001-02.2009-000

dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 16,297''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 32,532''$  LS.

**b. Batas Desa Bunibakti Kecamatan Babelan dengan Desa Samudra Jaya Kecamatan Kecamatan Tarumajaya :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pahlawan Setia, Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya, dan Desa Bunibakti Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2006-02.2001-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 16,772''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 30,847''$  LS.
2. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Tambun 3 Bagian hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 17,712''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 30,639''$  LS.
3. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu Perkampungan Tabun yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 18,101''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 26,783''$  LS.
4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati Perkampungan Tabun hingga bertemu Sungai Da 3 yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 22,692''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 23,800''$  LS.
5. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Sungai Da 3 hingga bertemu Jalan Tambun Jules yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 30,935''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 14,570''$  LS.
6. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as Jalan Tambun Jules hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 32,802''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 14,812''$  LS.

7. Selanjutnya ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 37,090''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 13,092''$  LS.
8. Selanjutnya ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 57,191''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 51,614''$  LS.
9. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-008 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 57,343''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 51,607''$  LS.
10. Selanjutnya ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-009 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 56,789''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 42,217''$  LS.
11. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-010 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 53,766''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 37,321''$  LS.
12. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tepi barat jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-011 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 51,618''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 26,952''$  LS.
13. Selanjutnya ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-012 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 47,681''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 44,278''$  LS.
14. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-013 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 44,323''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 38,460''$  LS.

15. Selanjutnya ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu Kawasan Pertamina yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-014 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 42,288''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 14,413''$  LS.
16. Selanjutnya ke arah barat laut melewati Kawasan Pertamina hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-015 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 40,144''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 4,445''$  LS.
17. Selanjutnya ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu tambak ikan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-016 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 39,138''$  BT dan  $6^{\circ} 4' 53,173''$  LS.
18. Selanjutnya ke arah utara melewati tambak ikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya, Desa Bunibakti, dan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-02.2004-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 39,266''$  BT dan  $6^{\circ} 4' 46,755''$  LS.

**c. Batas Desa Bunibakti dengan Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 26,247''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 26,002''$  LS.
2. Selanjutnya ke arah barat menyusuri as Sungai DT8 hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 38,123''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 2,570''$  LS.

**d. Batas Desa Bunibakti dengan Desa Kedung Pengawas  
Kecamatan Babelan :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 38,123''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 2,570''$  LS.
2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Alam hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 19,340''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 18,503''$  LS.
3. Selanjutnya ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Alam yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 14,190''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 19,884''$  LS.
4. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Alam hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 13,953''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 32,426''$  LS.
5. Selanjutnya ke arah timur melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 15,453''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 36,640''$  LS.
6. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 8,293''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 50,104''$  LS.
7. Selanjutnya ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Kedung Pengawas, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-02.2009-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 4,556''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 50,858''$  LS.

**e. Batas Desa Bunibakti dengan Desa Huripjaya  
Kecamatan Babelan :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 26,247''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 26,002''$  LS.
2. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Sungai CBL hingga bertemu Sungai Sembilangan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2004-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 2' 0,003''$  BT dan  $6^{\circ} 4' 56,983''$  LS.
3. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sembilangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya, Desa Bunibakti, dan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.01.2006-02.2001-02.2004-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 39,266''$  BT dan  $6^{\circ} 4' 46,755''$  LS.

**f. Batas Desa Bunibakti dengan Desa Kedungjaya  
Kecamatan Babelan :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Kedung Pengawas, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-02.2009-000 dengan koordina  $107^{\circ} 2' 4,556''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 50,858''$  LS.
2. Selanjutnya ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2009-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 1' 28,020''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 41,482''$  LS.
3. Selanjutnya ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Desa Bunibakti, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak

pada Titik Kartometrik 32.16.01.2004-02.2001-02.2009-000 dengan koordinat 107° 1' 16,297" BT dan 6° 7' 32,532" LS.

- (2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

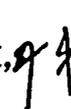
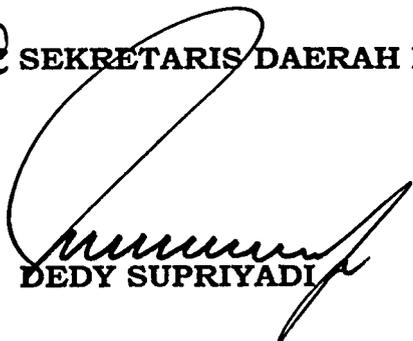
Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 9 Juni 2022

**Pj. BUPATI BEKASI**

TTD

**DANI RAMDAN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 9 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**   
  
**DEDY SUPRIYADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 11